



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI V DPR RI**

**(BIDANG PERHUBUNGAN, PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN, PEMBANGUNAN PEDESAAN DAN DAERAH TERTINGGAL,
TRANSMIGRASI, BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA (BMKG),
DAN BADAN NASIONAL Pencarian dan Pertolongan (BNPP/BASARNAS))**

Tahun Sidang	: 2025 – 2026
Masa Sidang	: II
Rapat	: Ke – 13
Jenis Rapat	: Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat
Hari/Tanggal	: Senin, 8 Desember 2025
Sifat	: Terbuka
Pukul	: 10.13 WIB s.d 13.30 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi V (Ruang KK V) Gedung Nusantara DPR RI.
Acara	: Membahas kesiapan Infrastruktur dan Transportasi dalam rangka libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026
Ketua Rapat	: Lasarus, S.Sos.,M.Si
Sekretaris	: Nina Herlina, S.H
Hadir Anggota	: 16 dari 48 orang Anggota Komisi V DPR RI.
Hadir Mitra	: Menteri Perhubungan, Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Kepala BMKG, dan Kepala BNPP/Basarnas beserta jajaran.

KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT

I. PENDAHULUAN

1. Rapat dibuka pada pukul 10.13.WIB setelah kuorum terpenuhi dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menyampaikan bahwa agenda Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI dengan Menteri Perhubungan, Menteri Pekerjaan Umum, Kepala BMKG, dan Kepala BNPP/Basarnas pada hari ini adalah Membahas kesiapan Infrastruktur dan Transportasi dalam rangka libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.
3. Ketua Rapat mempersilakan kepada Menteri Perhubungan, Menteri Pekerjaan Umum, Kepala BMKG, dan Kepala BNPP/Basarnas untuk menyampaikan paparan dan penjelasannya.
4. Ketua Rapat mempersilakan kepada Anggota Komisi V DPR RI untuk menyampaikan pertanyaan dan tanggapan

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT:

1. Komisi V DPR RI mendukung kebijakan dan rencana operasi Pemerintah dan stakeholder terkait dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan Angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 demi meningkatkan aspek keselamatan, keamanan, kenyamanan dan pelayanan prima kepada masyarakat di sektor infrastruktur jalan dan transportasi darat, laut, udara, kereta api dan sungai dengan membuat posko terpadu.
2. Komisi V DPR RI mewajibkan Mitra Kerja Komisi V DPR RI dan stakeholder terkait lainnya untuk mempercepat perbaikan tanggap darurat infrastruktur dan transportasi di lokasi bencana alam.
3. Komisi V DPR RI sepakat dengan Pemerintah, Operator Transportasi Nasional, dan Badan Usaha Jalan Tol untuk:
 - a) Meningkatkan koordinasi dan kolaborasi antar K/L, pemerintah daerah dan *stakeholder* terkait untuk mendukung operasi Natal 2025 dan tahun baru 2026;
 - b) Pemeriksaan menyeluruh terhadap kondisi fisik (*ramp check*) sarana dan prasarana transportasi darat, laut, udara, sungai, dan kereta api termasuk fasilitas keselamatannya;
 - c) Mengoptimalkan pengawasan harga tiket, *delay management*, dan *on time performance* semua moda transportasi serta digitalisasi tiket penyeberangan untuk mengantisipasi penumpukan penumpang;
 - d) Rekayasa lalu lintas pada titik potensi kemacetan di Jalan umum, kawasan wisata, daerah rawan kecelakaan, perlintasan sebidang dan ketersediaan fasilitas *buffer zone* khususnya pada puncak pergerakan keberangkatan dan kepulangan;
 - e) Penertiban truk *Over Dimension Over Loading* (ODOL), parkir kendaraan di bahu jalan, naik turun penumpang di luar terminal, bangunan liar di bahu Jalan dan pasar tumpah;
 - f) Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan percepatan penyelesaian preservasi Jalan Tol dan Jalan Nasional, pemberhentian sementara konstruksi infrastruktur dan penyediaan tim tanggap darurat di daerah rawan banjir, longsor dan rob;
 - g) Meningkatkan desiminasi informasi cuaca, iklim, gempa dan siklon tropis kepada K/L, operator transportasi, masyarakat dan *stakeholder* terkait secara cepat, tepat dan akurat;
 - h) Memastikan kesiapan personil dan peralatan dalam upaya kesiapsiagaan dan *quick response time* dalam penanganan kecelakaan dan bencana alam.
 - i) Mengedepankan pelayanan ramah dan humanis terhadap masyarakat khususnya lansia, disabilitas, ibu hamil dan anak;
 - j) Pemeriksaan kesehatan bagi supir, kapten kapal, pilot, dan masinis.

4. Komisi V DPR RI meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perhubungan untuk segera menyusun *masterplan* pembangunan infrastruktur dan transportasi dalam rangka mengatasi kemacetan.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 13.50.WIB.

Jakarta, 8 Desember 2025

KETUA RAPAT,
ttd

L A S A R U S

MENTERI PERHUBUNGAN,
ttd

DUDY PURWAGANDHI

**KEPALA BADAN METEOROLOGI
KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA,**
ttd

TEUKU FAISAL FATHANI

WAKIL MENTERI PEKERJAAN UMUM,
ttd

DIANA KUSUMASTUTI

**KEPALA BADAN NASIONAL
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN,**
ttd

MOHAMMAD SYAFII